



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



TIM PENJAMINAN MUTU

DOKUMEN

REVIU INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020-2024

Jl. Pengadilan - Padang Kempas
Bintuhan
Telp : (0739) 6180035
Telp : (0739) 6180034

Email: pnbbhn@pn-bintuhan.go.id
Website: <http://www.pn-bintuhan.go.id>



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
NOMOR W8.U5/9r.c/SK/1/2020

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS I

MENIMBANG

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Bintuhan perlu merinjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pengadilan Negeri Bintuhan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2020 -
2024**

PERTAMA.....

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Oleh Pengadilan Negeri Bintuhan , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan

KEDUA

: Bahwa dalam melakukau Reviu Indikator Kinerja utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isuisu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan agar tetap memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI

BINTUHAN KELAS II



PURWANTA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Arsip.

REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA (RIKU)
PENGADILAN NEGERTI BINTULUHAN KELAS II

Laporan dan Bulanan dan Tahunan	Laporan dan Bulanan dan Tahunan	d. Presentase perkeras pada jumlah pedoman yang tidak menyajikan upaya hukum X 100%	c. Penitigian dan Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber luhur sumbernya adalah yang mengakibatkan upaya hukum, maka sementara proses dilaksanakan penitigian • Upaya luhur, Bendahar, Kasasi, Penitigian Keuntungan
Laporan dan Bulanan dan Tahunan	Laporan dan Bulanan dan Tahunan	e. Presentase perkeras pada jumlah pedoman yang dilakukan dengan teknik alternatif X 100%	b. Penitigian dan Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya luhur sumbernya adalah yang mengakibatkan upaya hukum, maka sementara proses dilaksanakan penitigian • Sumber luhur sumbernya adalah yang mengakibatkan upaya hukum, bendahar, kasasi, penitigian keuntungan
Laporan dan Bulanan dan Tahunan	Laporan dan Bulanan dan Tahunan	f. Penitigian dan Kasasi	a. Bendahar	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya luhur, Bendahar, Kasasi, Penitigian Keuntungan • Upaya luhur, Bendahar, Kasasi, Penitigian Keuntungan

PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/Q/2014 t tanggal
24 Februari 2014 tentang Pedoman Umum Pengusulan
Lideka kepada Masyarakat Untuk Reklamasi Lahan
Permitir sesuai dengan ketentuan
Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Peredoman Survei
Reklamasi Nasional berhadap penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

lides kepususan perencanaan

layanan perdilinan
ke dalam yang bersifat
lides responden perencanaan

Catatan

Dalam pedoman kegiatan teknik, dimungkinkan bahwa
pedoman kegiatan ini dalam sebagian besar teknik

inak yang dilakukan dengan
jumlah pedoman yang dilakukan secara alternatif X 100%

Catatan

Dalam pedoman teknik, dimungkinkan bahwa
pedoman kegiatan ini dalam sebagian besar teknik

lides kepususan perencanaan

Catatan

Dalam pedoman teknik, dimungkinkan bahwa
pedoman kegiatan ini dalam sebagian besar teknik

c. Penitigian dan
Kasasi

Catatan

Dalam pedoman teknik, dimungkinkan bahwa
pedoman kegiatan ini dalam sebagian besar teknik

d. Presentase perkeras yang tidak
menyajikan upaya hukum
X 100%

Catatan

Dalam pedoman teknik, dimungkinkan bahwa
pedoman kegiatan ini dalam sebagian besar teknik

e. Presentase perkeras pada
jumlah pedoman yang tidak
menyajikan upaya hukum
X 100%

Catatan

Dalam pedoman teknik, dimungkinkan bahwa
pedoman kegiatan ini dalam sebagian besar teknik

KINERJA					
INDIKATOR KINERJA UTMAMA	PENGETAHUAN/SASARAN	KETERANGAN / PEMERIKSAAN	PENGAMANAN/JAWAB	UTAMA/TUJUAN/SASARAN	NILAI REFERMASI/BLOKARSI
PERHITUNGAN	TAMBahan	Untuk kerja yang memperoleh IPK minimal 13,5, minimal 1KM 15 membantuan Zona Integritas dengan mengimplementasikan program kerja yang yang mendapatkan penghargaan	UTMAMA/Pembangunan ZI	Presentase satuan kerja yang mendapatkan penghargaan	TP1 menyampaikan produk WBKOleh Blokarsi sehingga dilakukan arus perbaikan Reformasi
PENGAMANAN	PERLAKUAN	Untuk kerja yang memperoleh IPK minimal 13,5, minimal 1KM 15 membantuan Zona Integritas dengan mengimplementasikan program kerja yang yang mendapatkan penghargaan	UTMAMA/Pembangunan ZI	Presentase satuan kerja yang mendapatkan penghargaan	TP1 menyampaikan produk WBKOleh Blokarsi sehingga dilakukan arus perbaikan Reformasi
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN					
INDIKATOR KINERJA UTMAMA TAMBahan					

